



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 104, Maret 2018



Komisioner Tinggi HAM PBB Kunjungi Lemhannas RI (hal. 4)

2. Anggota Entrepreneurs' Organization Perdalam Nilai-Nilai Kebangsaan
3. Humas Lemhannas RI Kunjungi Media Group
4. Komisioner Tinggi HAM PBB Kunjungi Lemhannas RI
5. Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Lakukan Lawatan ke Lemhannas RI
5. KPK Lakukan Sosialisasi e-LHKPN di Lemhannas RI
6. Lemhannas RI Adakan Pre-Course bagi Calon Peserta PPRA Mancanegara
7. Menteri Agama Bicara Makna Toleransi Beragama dalam Ceramah Taplai EO Angkatan II
8. Dr. Yudi Latif: Pancasila Jadikan Indonesia Miniatur Dunia
9. Tim Kemen PAN-RB Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI
10. Jam Pimpinan : Tingkatkan *Capacity Building* dan *Quick Response* lewat Forum Berbagi Ilmu (FBI)
11. Calon Peserta PPRA LVII dan LVIII Mancanegara Belajar Mengenal Budaya Lokal Jawa Timur
11. Kedeputan Pendidikan Gelar Konsolidasi Bahas Kesiapan Pelaksanaan PPRA LVII - LVIII

Anggota Entrepreneurs' Organization Perdalam Nilai-Nilai Kebangsaan



Memasuki bulan kedua tahun 2018, Lemhannas RI kembali menyelenggarakan program kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai). Program kegiatan tersebut diikuti oleh 96 orang peserta. Dari total 96 orang peserta, 74 orang diantaranya berasal dari *Entrepreneur Organization (EO)*, 20 orang dari Kementerian Perindustrian, dan 2 orang dari Pemuka Agama. "Kegiatan taplai ini dilaksanakan selama tujuh hari, dan dibuka pada Senin 5 Februari 2018 di ruang NKRI gedung Pancagatra Lemhannas RI, serta ditutup 11 Februari 2018 di Villa Ratu Ciawi Cikretek, Bogor," ujar Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., pada saat menyampaikan laporan kesiapan dihadapan para peserta Taplai.

Program kegiatan Taplai kali ini mengangkat tema "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara". Dalam program kegiatan ini, disampaikan pula beberapa hal terkait peran penting pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, serta implementasi

sistem manajemen nasional dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dalam sambutannya mewakili Gubernur Lemhannas RI berharap agar para peserta dapat memanfaatkan program Taplai ini dengan sebaik-baiknya. Menurut Bagus Puruhito, peran serta pengusaha dalam memajukan negara memiliki andil yang cukup besar. "Jika dunia usaha semakin meningkat, maka akan menumbuhkan usaha-usaha baru yang nantinya dapat menampung lebih banyak lagi jumlah tenaga kerja," ujar Bagus Puruhito. Melalui program Taplai ini, para peserta sebagai pelaku usaha yang terorganisir diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Dedy Yulianto terkait pengenalan kelembagaan dan ke deputian serta penyampaian peraturan pada saat mengikuti kegiatan taplai kepada para peserta. ●

Humas Lemhannas RI Kunjungi Media Group

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto didampingi Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi, mengunjungi kantor Media Group di Kebon Jeruk, Jakarta (6/2). Kunjungan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara Lemhannas RI dengan Media Group.

Kedatangan Kepala Biro Humas Lemhannas RI beserta tim disambut baik oleh Public Relations and Publicity Manager Henny Puspitasari yang didampingi Kepala Sekretariat Redaksi Media Indonesia Sadyo Kristiarto, Wakil Pemimpin Redaksi MetroTVNews.com Khudori, beserta jajarannya. Henny Puspitasari menyampaikan bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Media Group, kesempatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum untuk mengevaluasi dan saling memberi masukan bagi kedua belah pihak.

Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah menyadari pentingnya peran media dalam mendukung program kerja Lemhannas RI khususnya dalam menyampaikan kinerja Lemhannas RI dan juga turut serta menguatkan ketahanan nasional bangsa. Pada kesempatan tersebut, Media Group juga menyampaikan beberapa informasi dan masukan kepada Humas Lemhannas RI terkait alur kerja redaksi di media agar hubungan kerja antara humas dan jurnalis dapat lebih efektif dalam hal peliputan kegiatan lembaga.

Sebelumnya, Lemhannas RI juga bekerja sama dengan Eagle Institute Metro TV dalam penyelenggaraan kompetisi film dokumenter Eagle Award pada tahun 2015 dengan tajuk "Merajut Indonesia". Kegiatan tersebut merupakan salah satu kolaborasi Lemhannas RI dengan Metro TV dalam upaya menggugah dan membangkitkan semangat akan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ●

“

“Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah menyadari pentingnya peran media dalam mendukung program kerja Lemhannas RI khususnya dalam menyampaikan kinerja Lemhannas RI dan juga turut serta menguatkan ketahanan nasional bangsa.”

*Kepala Biro Humas Lemhannas RI
Brigjen TNI Mindarto*



Komisioner Tinggi HAM PBB Kunjungi Lemhannas RI

Komisioner Tinggi HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dr. Zeid Ra'ad Al Hussein beserta rombongan melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (6/2) dan disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi *Courtesy Call* di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

Dalam *Courtesy Call* tersebut, Dr. Zeid mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi PBB selama 70 tahun terakhir ini adalah belum adanya solusi yang tepat untuk merekonsiliasi masyarakat di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian seperti yang pernah terjadi di Mozambik dan Lebanon dengan perang sipilnya. Dr. Zeid juga mengatakan bahwa negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal menghadapi kesulitan untuk berdamai dengan masa lalu mereka dan mengatasi isu-isu yang terkait

dengan pertikaian tersebut. Dr. Zeid berharap Lemhannas RI ini dapat memberikan masukan kepada PBB mengenai solusi rekonsiliasi nasional di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian.

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa untuk berdamai dengan masa lalu, negara-negara yang pernah mengalami pertikaian akan menghadapi kesulitan karena adanya ingatan akan masa lalu. Solusi untuk rekonsiliasi dan berdamai dengan masa lalu juga akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain karena adanya pengaruh budaya sehingga akan memerlukan pendekatan yang berbeda agar tercapainya rekonsiliasi nasional. "Saya percaya

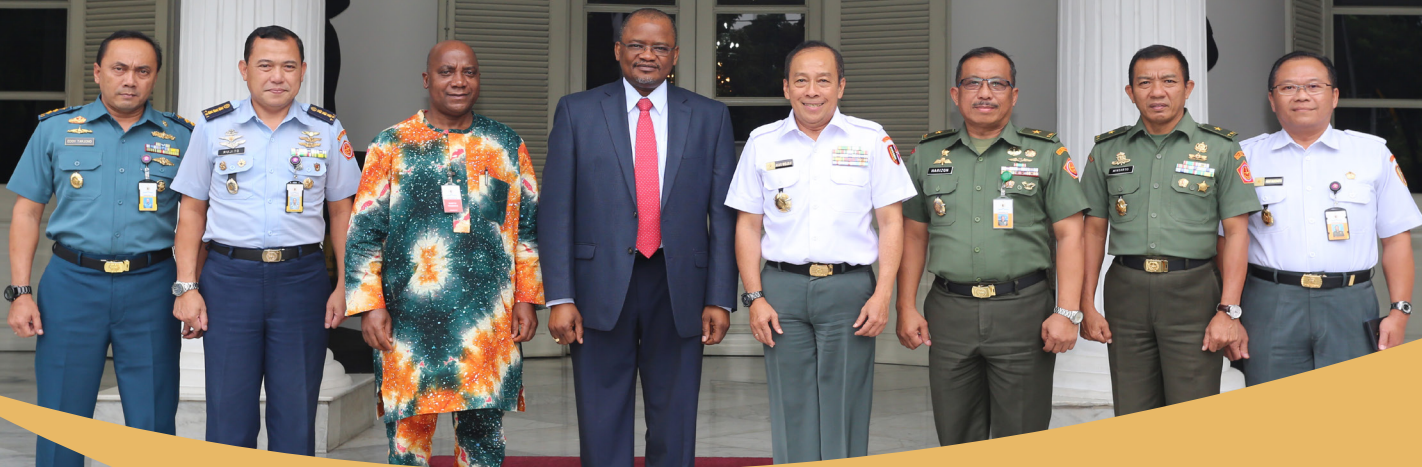
bahwa pengaruh budaya dalam rekonsiliasi tetap ada sehingga tiap negara memerlukan pendekatan yang berbeda untuk berdamai dengan masa lalu," jelas Agus Widjojo.

Courtesy Call tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengenai isu-isu rekonsiliasi nasional untuk negara-negara yang pernah mengalami pertikaian internal. Hadir dalam *Courtesy Call* tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Lemhannas RI Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS.●

“Salah satu tantangan terbesar bagi PBB selama 70 tahun terakhir ini adalah belum adanya solusi yang tepat untuk merekonsiliasi masyarakat di negara-negara yang pernah mengalami pertikaian seperti yang pernah terjadi di Mozambik dan Lebanon dengan perang sipilnya.

*Komisioner Tinggi PBB
Dr. Zeid Ra'ad Al Husein*





Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Lakukan Lawatan ke Lemhannas RI

Pada Rabu (7/2), Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Muhammad L. Sulaiman melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk melakukan *Courtesy Call* kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Dalam *Courtesy Call* tersebut Muhammad L. Sulaiman mewakili *Nigeria War Defence College* memberitahukan mengenai rencana kunjungan peserta pendidikan *Nigeria War Defence College* ke Indonesia. Dalam kunjungan ke Indonesia, para peserta pendidikan tersebut rencananya akan berkunjung ke Lemhannas RI, Kementerian Pertahanan RI, dan juga Institusi Pertahanan dan Kebijakan di Indonesia.

Berkaitan dengan kunjungan ke Lemhannas RI, para peserta dari *Nigeria War Defence College* ingin mengetahui lebih dalam mengenai penanggulangan terorisme dan keamanan nasional di Indonesia. Muhammad L. Sulaiman berharap kunjungan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan juga institusi militer dari kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo menyambut positif rencana kunjungan tersebut dan akan mempersiapkan materi kunjungan dengan baik. Ia juga berharap bahwa kunjungan dan diskusi dapat memberikan manfaat bagi kedua institusi.

Courtesy Call tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai detail kunjungan dan foto bersama. ●

KPK Lakukan Sosialisasi e-LHKPN di Lemhannas RI

KPK mengadakan sosialisasi penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN), di Ruang Syailendra Gedung Asta Gatra Lemhannas RI, Kamis (15/2). Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pejabat struktural dan pegawai Lemhannas RI dengan dibuka oleh Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si. Triyono mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk penyampaian informasi terkait LHKPN kepada seluruh personel Lemhannas. "Sangat penting sekali acara hari ini karena menyangkut hal-hal yang merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 perihal tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LKHPN," ujar Triyono.

Materi sosialisasi yang di sampaikan secara langsung oleh Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan adalah cara melaporkan harta kekayaan yang digunakan sebagai salah satu cara pencegahan korupsi, dasar hukumnya, serta mekanisme pelaporan yang baru dengan menggunakan e-LKHPN.

"Ada hal yang memotivasi untuk melakukan korupsi, *Need* (kebutuhan), *Opportunity* (kesempatan), *Exposure* (pengungkapan) dan *Greed* (keserakahan)," ungkap Kunto. Dalam hal ini, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan

harta kekayaannya untuk mencegah korupsi. Laporan harta kekayaan harus sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, dan memiliki data yang lengkap.

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai laporan harta kekayaan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, KEP KPK Nomor 07/KPK/2/2005 tentang cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme yang digunakan dalam e-LHKPN semakin memudahkan dalam pelaporan harta kekayaan karena berbasis elektronik yang dapat diakses melalui website www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang diinput oleh penyelenggara negara secara otomatis tersimpan dalam server di KPK. ●



Lemhannas RI Adakan Pre-Course bagi Calon Peserta PPR Mancanegara

Calon peserta PPRA LVII dan LVIII tahun ajaran 2018 yang berasal dari negara sahabat menerima pembekalan awal tentang pengenalan kelembagaan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Settima Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto, Rabu (7/2) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra Lt. III, Lemhannas RI. Calon peserta dari negara sahabat tersebut terdiri dari 14 orang yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.

Kegiatan pembekalan tersebut diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerja Sama Internasional

Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In DS., M.A., RCDS. Dalam sambutannya Rujito berpesan agar para calon peserta terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia agar dapat mengikuti program pendidikan dengan baik. "Bahasa Indonesia mengalami tantangan dalam kehidupan, terutama di era media sosial. Calon peserta harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan listening, speaking, kemudian reading, dan yang paling berat adalah tahap menulis." ujar Rujito.

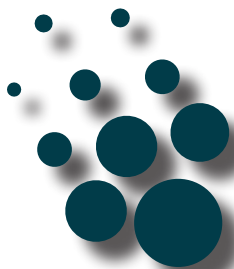
Selanjutnya, Brigjen TNI Mindarto memberikan paparan mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI, makna simbol Lemhannas RI, visi dan

misi Lemhannas RI, serta struktur organisasi dan program kerja Lemhannas RI.

Adapun acara berikutnya dilanjutkan dengan paparan tentang tata tertib Lemhannas RI oleh Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki P, M. Si., pengenalan kurikulum, taskap dan binta oleh Dr. Yulianus Pongtuluran, S.E., M.Ed., dan pengenalan bidang studi kepemimpinan oleh Drs. Hanif Salim, M.A.●

"Bahasa Indonesia mengalami tantangan dalam kehidupan, terutama di era media sosial. Calon peserta harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan listening, speaking, kemudian reading, dan yang paling berat adalah tahap menulis."
Kepala Divisi Kerjasama Internasional
Kolonel Lek Rujito D. Asmoro,
Gdipl In DS., M.A., RCDS





Menteri Agama Bicara Makna Toleransi Beragama dalam Ceramah Taplai EO Angkatan II

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin berkesempatan memberikan ceramah kepada peserta di Lemhannas RI, Rabu (7/2) di hari kedua Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) untuk *Entrepreneurs' Organization* (EO). Materi yang diangkat adalah mengenai toleransi beragama di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Lukman mengatakan bahwa manusia sebagai umat beragama yang menyadari akan adanya perbedaan keyakinan antar warga negara seharusnya dapat lebih toleran terhadap perbedaan tersebut. "Mestinya tidak ada diantara kita yang paling berhak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sayalah yang paling benar dan Anda yang lain salah," jelas Lukman.

Meskipun setiap penganut ajaran agama meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik, Lukman mengimbau agar hal tersebut tidak memicu perasaan bahwa agama yang satu lebih baik dari agama yang lain. "Karena sesuatu yang begitu sempurna datang dari sang Maha Kuasa, kemudian diinterpretasikan oleh umat manusia yang terbatas, jangan kan antara satu agama dengan agama yang lain, di internal tiap agama itu keragamannya juga luar biasa," ujar Lukman.

Lukman kemudian mengatakan bahwa kunci utama bertoleransi adalah rendah hati dalam beragama, saling menghormati dan menghargai perbedaan. "Hal tersebut adalah titik yang harus dicermati dengan baik, karena itu adalah awal mula agar kita dapat bertoleransi dengan baik," ujar Lukman. Agama, lanjut Lukman, menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menjaga kemajemukan warga demi terjaganya keutuhan bangsa dan negara.

Selain toleransi dan rendah hati dalam beragama, esensi dan substansi agama pada hakikatnya adalah untuk

memanusiakan manusia agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan dapat terjaga. "Semua agama mengajarkan keadilan, menghargai, melindungi persamaan HAM di depan hukum," tambah Lukman.

Dalam berpolitik, agama juga tidak bisa dipisahkan dari segala aktivitas keseharian. "Perlu dicermati bahwa bukan memisahkan agama dengan politik, karena ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan, karena kita bukan bangsa yang sekuler. Ciri negara sekuler yaitu memisahkan secara drastis persoalan kehidupan dengan keagamaan. Mereka dapat memisahkan secara tegas dan tidak ada urusan Anda mau rajin beragama atau tidak," tegas Lukman.

Ia berpesan kepada para peserta Taplai untuk EO yang berlatar belakang sebagai pegiat usaha tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu yang bersifat negatif. ●

“Mestinya tidak ada diantara kita yang paling berhak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa sayalah yang paling benar dan Anda yang lain salah,”

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin



“Lima sila Pancasila tersebut menggambarkan Indonesia sebagai suatu heterogenitas multikulturalisme bangsa ini,”

Kepala Satuan Kerja Presiden tentang Pelaksanaan Ideologi Negara Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif

Dr. Yudi Latif: Pancasila Jadikan Indonesia Miniatur Dunia

Indonesia dapat dikatakan sebagai miniatur dunia karena jenis keragaman dunia tersebut hadir disini, dan semua itu disimbolisasikan oleh Lima sila Pancasila,” ungkap Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Dr. Yudi Latif dalam ceramahnya dihadapan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) *Entrepreneurs' Organization (EO)*, Rabu (7/2) pagi di Lemhannas RI.

“Lima sila Pancasila tersebut menggambarkan Indonesia sebagai suatu *heterogenitas multikulturalisme* bangsa ini,” ujar Yudi Latif. Yudi menjelaskan bahwa Pancasila menjadi inspirasi dalam berprestasi, bukan hanya prestasi sebagai individu tetapi menjadi prestasi bersama. Namun, permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini cenderung menciptakan pencapaian secara individu, dan sulit untuk mengubah kepada capaian yang berjejaring. “Problem kita justru ketika capaian-capaian pribadi itu harus berjejaring menjadi suatu kekuatan kolektif,” jelas Yudi Latif.

Yudi memberikan gambaran singkat makna dari kelima sila Pancasila kepada peserta Taplai, seperti

pada sila pertama yang menyiratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan multi agama sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kemudian dalam sila kedua yang menyiratkan kemajemukan penduduk berdasarkan ras manusia. Sedangkan pada sila ketiga menggambarkan bangsa ini sebagai bangsa yang beragam, namun pada saat yang sama menyadari akan adanya tautan-tautan persatuan. Penjelasan terkait sila keempat, yakni mengenai keberagaman partai dan aliran partai politik, serta sila kelima yang menggambarkan kemajemukan dari segi lapisan kelas sosial.

Menurut Yudi, dalam hal membumikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami lima isu strategis, diantaranya adalah pemahaman Pancasila, inklusi sosial, keadilan sosial, pelebagaan Pancasila, dan keteladanan Pancasila. ●

Tim Kemen PAN-RB Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI



Pada Jumat (9 / 1), Lemhannas RI menerima kedatangan Tim

Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka menghadiri rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Nusantara II, Gd.Trigatra Lemhannas RI, dipimpin oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Immanuel Larosa yang mewakili Sekretaris Utama Lemhannas RI. Ketua Tim KemenPAN-RB Ronald Andrea Annas yang hadir sebagai pembicara utama menjelaskan pentingnya evaluasi kinerja di lingkungan Lemhannas.

Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ronald Andrea dalam paparannya antara lain perlu

adanya manajemen perubahan dengan menyusun roadmap reformasi birokrasi, memiliki *quick win* yang terkait dengan kurikulum pendidikan reguler PPRA, serta membuat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang dapat dijadikan *benchmarking* atau pembandingan dan pusat data bagi instansi lain, serta bisa menunjuk *agent of change*.

Sedangkan rekomendasi yang dapat digunakan adalah dengan terus menginternalisasikan budaya kerja secara terus menerus di seluruh organisasi, dan meningkatkan peran *agent of change* sebagai penggerak reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Lebih lanjut Ronald menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis akan lebih baik jika telah melalui proses identifikasi, analisis, dan revisi, memiliki SOP terkait

penyusunan Peraturan Gubernur serta terus melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan produk hukum.

Selain itu, Ronald Andrea juga menegaskan bahwa diperlukan penataan dan penguatan organisasi dengan menyelesaikan proses reorganisasi yang sedang berjalan serta memastikan bahwa reorganisasi yang dilakukan juga mampu menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang baik. Terkait penguatan pengawasan, Lemhannas perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk penanganan kebijakan pengawasan yang sudah ada, melakukan pembinaan kepada unit eselon 1 untuk diajukan sebagai unit kerja menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah atau APIP (dalam hal ini Inspektorat).●



Jam Pimpinan : Tingkatkan *Capacity Building* dan *Quick Response* lewat Forum Berbagi Ilmu (FBI)

Academic sharing atau Forum Berbagi Ilmu (FBI) yang digelar di ruang Kresna Gd. Astagatra Lemhannas RI, Senin (12/2) pagi dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan didampingi oleh Wakil Gubernur serta Sekretaris Utama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan pembentukan FBI yang bertujuan membangun kapasitas (*capacity building*) intelektual jajaran Lemhannas RI. Di samping itu, untuk memberikan forum wacana bagi perumusan pemecahan masalah nyata kebangsaan dan kemasyarakatan yang memerlukan solusi jangka pendek sampai menengah.

"Organisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan waktu, untuk menjaga kesegaran organisasi melalui *regenerasi/kaderisasi*. Hal tersebut melalui dimensi usia, tetapi ada juga yang dimensi kebutuhan *kualitatif*, yaitu apabila dinilai masih memiliki, masih bisa dipertimbangkan," ujar Agus Widjojo kepada para peserta *sharing academy* yang terdiri dari para Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional.

Dengan terbentuknya FBI diharapkan mampu memecahkan kebuntuan dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa. Selain itu, *outcome* yang ingin dicapai dari forum ini adalah memberi sumbangan bagi pembangunan bangsa, serta berkontribusi untuk memperlancar penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hasil atau tujuan pendukung yang

diharapkan melalui forum ini untuk menghasilkan *quick response*, serta sebagai sarana pengambilan bahan dalam bank kajian untuk mengisi kebutuhan publikasi di luar dan di dalam Lemhannas.

Menurut Taprof Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. mengatakan bahwa pembentukan forum semacam FBI ini dinilai sangat baik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para anggotanya. Namun Prof. Dadan beranggapan bahwa untuk mengombinasikan antara meningkatkan *capacity building* dan *quick response* tidaklah mudah. "Kalau kita berbicara mau meningkatkan *capacity building* itu memang bisa *scheduled* dan bisa juga tematik. Tapi kalau *quick response* itu *unstructured, unscheduled*, dan kita tidak tahu temanya. Dua hal ini sangat sulit mengombinasikan," ujar Prof. Dadan.

Agus Widjojo kemudian mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak harus dipikirkan secara kaku, namun yang lebih diutamakan adalah *quick response*. "Mungkin kita tidak perlu terlalu kaku untuk memecahkan antara keduanya. Ini bisa menjadi satu, dan yang kita utamakan adalah *quick response*, untuk merespon keadaan saat ini," ujar Agus Widjojo. ●

"Organisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan waktu, untuk menjaga kesegaran organisasi melalui regenerasi/kaderisasi.

Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo



Calon Peserta PPRA LVII dan LVIII Mancanegara Belajar Mengenal Budaya Lokal Jawa Timur

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII dimulai, calon peserta yang berasal dari negara sahabat melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang. Kunjungan yang diagendakan selama enam hari (12 – 17 Februari 2018) tersebut dilaksanakan dalam rangka pengenalan budaya lokal.

Dengan didampingi langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Laksm TNI Budi Setiawan, S.T., dan Taji Muda Bidang Sosbud Kolonel Adm. Matheus Eko Herry, sebanyak 13 orang calon peserta PPRA LVII dan LVIII yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe melakukan kunjungan ke beberapa lokasi strategis.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan strategis di Surabaya adalah melakukan dialog bersama dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum., dilanjutkan dengan kunjungan ke PT. PAL, kemudian berkunjung ke Lantamal V Surabaya. Sedangkan untuk agenda di Kota Malang yakni bertemu dengan Danlanud Abdul Rachman Saleh, kemudian melakukan dialog dengan Walikota Malang Ir. H. Mochamad Anton, serta bertemu dengan Direktur PT. Pindad.



D i samping agenda diskusi bersama narasumber, calon peserta juga melakukan kunjungan ke beberapa objek budaya lokal, diantaranya Jembatan Suramadu, melihat kegiatan di Sanggar Batik Butik Athaya, Monumen Tugu Pahlawan, *House of Sampoerna*, Monkansel, dan berwisata di Agro Wisata Madu serta Agro Wisata Batu. ●

Kedeputan Pendidikan Gelar Konsolidasi Bahas Kesiapan Pelaksanaan PPRA LVII - LVIII

Selasa (13/2), Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI menggelar kegiatan konsolidasi selama 2 hari pada 13 dan 14 Februari 2018 terkait kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Konsolidasi dihadiri oleh para Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta pejabat struktural Lemhannas RI. Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Lemhannas RI yang menyampaikan pentingnya kegiatan konsolidasi sebagai persiapan pendidikan yang akan digelar. "Acara ini merupakan langkah awal sebagai upaya agar penyelenggaraan program pendidikan 2018 dapat mencapai target dan sasaran seperti yang direncanakan dan kegiatan ini memiliki arti penting dalam proses pengajaran dan penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional yang akan mengikuti pendidikan tahun ini." ujar Agus Widjojo.

Tujuan diadakan konsolidasi program kerja ini adalah sebagai bentuk sosialisasi petunjuk teknis deputi bidang pendidikan, dan penyamaan persepsi semua aspek penyelenggaraan PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) LVII dan LVIII tahun 2018. Beberapa materi yang dibahas dalam konsolidasi tersebut antara lain seputar evaluasi operasi pendidikan (OPSDIK) tahun 2017, penjelasan mekanisme pendidikan, dan kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018.

Gubernur berharap konsolidasi ini tidak hanya dipandang sebagai rutinitas kegiatan awal tahun namun merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun. "Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu selama dua hari ke depan dengan sebaik baiknya agar dapat memahami dan mampu mempersiapkan diri secara profesional dan proporsional dalam

mendukung keberhasilan penyelenggaraan PPRA LVII dan LVIII sehingga konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi para peserta terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran sesuai yang diharapkan," ujar Agus Widjojo. ●





Tim **Redaksi** newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Arif Wachyunadi** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Wahyu Widji Pamungkas** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Andriansyah** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>